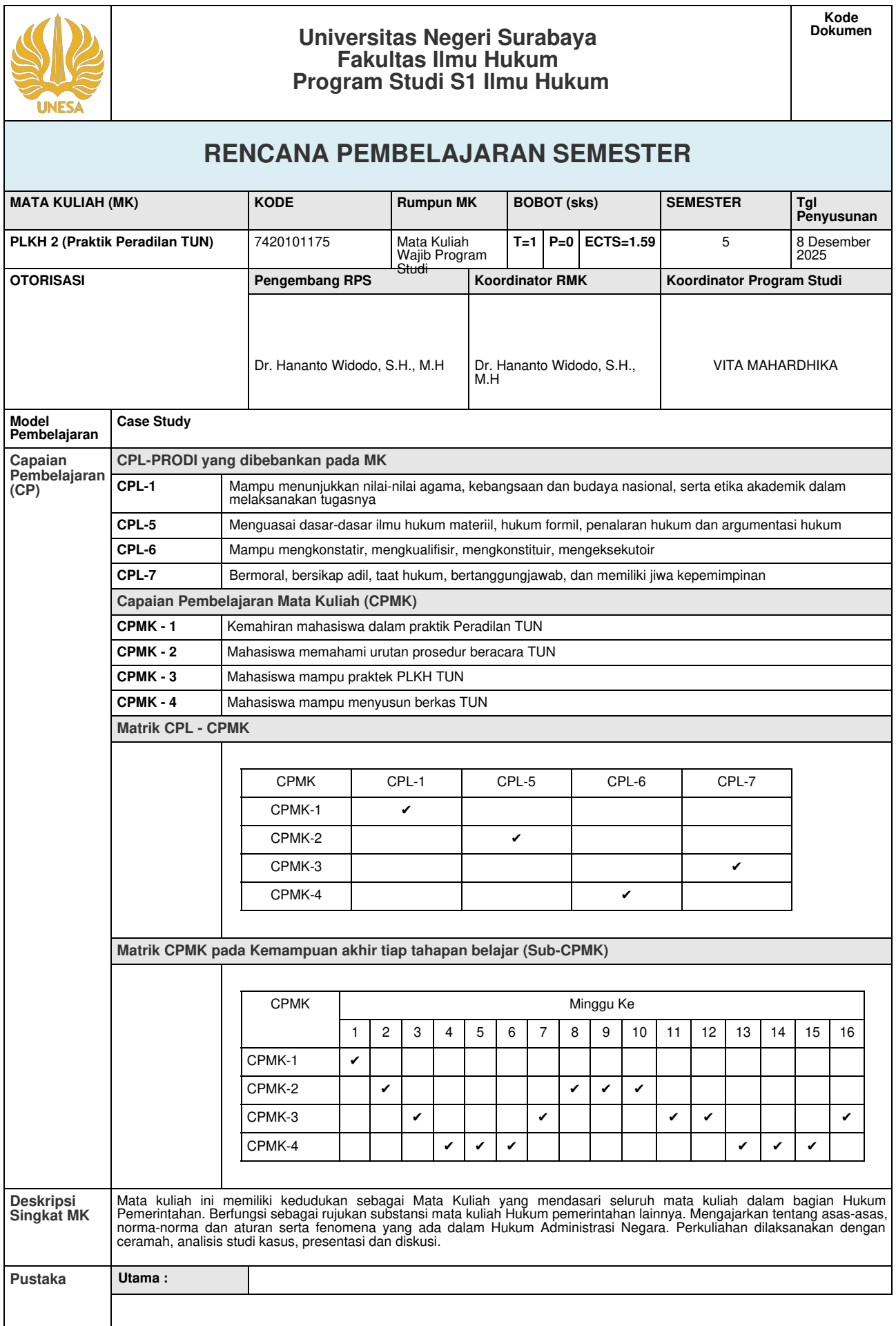




		1. Hilaire Barnett, Constitutional and Administrative Law , Fourth Edition, London : Cavendish Publishing, 2002. HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara , Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006. Philipus M. Hadjon, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi , Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011. _____, Hukum Administrasi dan Good Governance , Universitas Trisakti, Jakarta, 2012. Nuryanto A. Daim, Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Surabaya, Laksbang, 2014.					
		Pendukung :					
Dosen Pengampu		Muh. Ali Masnun, S.H., M.H. Intan Lovisonnya, SH.,MH. Ahmad Muhajir Firrizqi Mubaroq, S.H., M.Kn.					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Menyusun beracara PTUN, Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang sumber hukum berlakunya PTUN, asas-asas PTUN, subjek dan objek PTUN, posita dan petitum	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara	Kriteria: BAIK, CUKUP, KURANG Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara 1 X 50		Materi: Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara Pustaka: Hilaire Barnett, Constitutional and Administrative Law , Fourth Edition, London : Cavendish Publishing, 2002. HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara , Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006. Philipus M. Hadjon, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi , Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011. _____, Hukum Administrasi dan Good Governance , Universitas Trisakti, Jakarta, 2012. Nuryanto A. Daim, Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Surabaya, Laksbang, 2014.	5%

2	Menyusun beracara PTUN, Mahasiswa dapat menjelaskan alur penyelesaian sengketa di PTUN, upaya administrasi dan gugatan langsung melalui PTUN	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara	Kriteria: BAIK, CUKUP, KURANG Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara 1 X 50		Materi: Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara Pustaka: <i>Hilaire Barnett, Constitutional and Administrative Law , Fourth Edition, London : Cavendish Publishing, 2002. HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara , Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006. Philipus M. Hadjon, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi , Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011.</i> <i>Hukum Administrasi dan Good Governance , Universitas Trisakti, Jakarta, 2012. Nuryanto A. Daim, Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Surabaya, Laksbang, 2014.</i>	5%
3	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara, Mahasiswa mampu menjelaskan alasan mengajukan gugatan, syarat-syarat gugatan PTUN dan menetapkan satu kasus untuk masing-masing kelompok	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara	Kriteria: baik apabila benar semua, cukup apabila benar 50%, kurang apabila benar kurang dari 50% Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara 1 X 50		Materi: Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara Pustaka: <i>Hilaire Barnett, Constitutional and Administrative Law , Fourth Edition, London : Cavendish Publishing, 2002. HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara , Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006. Philipus M. Hadjon, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi , Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011.</i> <i>Hukum Administrasi dan Good Governance , Universitas Trisakti, Jakarta, 2012. Nuryanto A. Daim, Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Surabaya, Laksbang, 2014.</i>	5%

						Materi: Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara Pustaka: Hilaire Barnett, <i>Constitutional and Administrative Law</i>, Fourth Edition, London : Cavendish Publishing, 2002. HR, Ridwan, <i>Hukum Administrasi Negara</i>, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006. Philipus M. Hadjon, <i>Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi</i>, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011. <i>Hukum Administrasi dan Good Governance</i>, Universitas Trisakti, Jakarta, 2012. Nuryanto A. Daim, <i>Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara</i>, Surabaya, Laksbang, 2014.	
--	--	--	--	--	--	---	--

4	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara, Setiap kelompok memulai proses pemeriksaan sengketa pendahuluan di depan kelas	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara	Kriteria: baik apabila benar semua, cukup apabila benar 50%, kurang apabila benar kurang dari 50% Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Praktik / Unjuk Kerja	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara 1 X 50		Materi: Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara Pustaka: <i>Hilaire Barnett, Constitutional and Administrative Law , Fourth Edition, London : Cavendish Publishing, 2002. HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara , Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006. Philipus M. Hadjon, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi , Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011.</i> <i>Hukum Administrasi dan Good Governance , Universitas Trisakti, Jakarta, 2012. Nuryanto A. Daim, Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Surabaya, Laksbang, 2014.</i>	5%
5	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara, mahasiswa membacakan gugatan replik dan duplik	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara	Kriteria: baik apabila benar semua, cukup apabila benar 50%, kurang apabila benar kurang dari 50% Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara 1 X 50		Materi: Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara Pustaka: <i>Hilaire Barnett, Constitutional and Administrative Law , Fourth Edition, London : Cavendish Publishing, 2002. HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara , Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006. Philipus M. Hadjon, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi , Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011.</i> <i>Hukum Administrasi dan Good Governance , Universitas Trisakti, Jakarta, 2012. Nuryanto A. Daim, Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Surabaya, Laksbang, 2014.</i>	5%

6	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara, elemen-elemen yang harus ada dalam putusan	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara	Kriteria: baik apabila benar semua, cukup apabila benar 50%, kurang apabila benar kurang dari 50% Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara 1 X 50	Materi: Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara Pustaka: Hilaire Barnett, <i>Constitutional and Administrative Law</i>, Fourth Edition, London : Cavendish Publishing, 2002. HR, Ridwan, <i>Hukum Administrasi Negara</i>, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006. Philipus M. Hadjon, <i>Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi</i>, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011. Hukum Administrasi dan Good Governance, Universitas Trisakti, Jakarta, 2012. Nuryanto A. Daim, <i>Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara</i>, Surabaya, Laksbang, 2014.	5%
---	---	---	---	---	--	----

7	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara, membuat putusan yang benar	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara	Kriteria: BAIK, CUKUP, KURANG Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara 1 X 50	Materi: Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara Pustaka: Hilaire Barnett, <i>Constitutional and Administrative Law</i> , Fourth Edition, London : Cavendish Publishing, 2002. HR, Ridwan, <i>Hukum Administrasi Negara</i> , Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006. Philipus M. Hadjon, <i>Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi</i> , Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011. _____, <i>Hukum Administrasi dan Good Governance</i> , Universitas Trisakti, Jakarta, 2012. Nuryanto A. Daim, <i>Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara</i> , Surabaya, Laksbang, 2014.	5%
---	---	---	--	--	--	----

8	USS	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara	Kriteria: BAIK, CUKUP, KURANG Bentuk Penilaian : Praktik / Unjuk Kerja	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara 1 X 50	Materi: Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara Pustaka: <i>Hilaire Barnett, Constitutional and Administrative Law , Fourth Edition, London : Cavendish Publishing, 2002. HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara , Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006. Philipus M. Hadjon, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi , Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011.</i> <i>Hukum Administrasi dan Good Governance , Universitas Trisakti, Jakarta, 2012. Nuryanto A. Daim, Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Surabaya, Laksbang, 2014.</i>	15%
---	-----	---	---	--	---	-----

9	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara, Mahasiswa dapat memahami intervensi pihak ketiga sebagai subjek perkara	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara	Kriteria: BAIK, CUKUP, KURANG Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara 1 X 50	Materi: Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara Pustaka: Hilaire Barnett, <i>Constitutional and Administrative Law</i> , Fourth Edition, London : Cavendish Publishing, 2002. HR, Ridwan, <i>Hukum Administrasi Negara</i> , Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006. Philipus M. Hadjon, <i>Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi</i> , Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011. _____, <i>Hukum Administrasi dan Good Governance</i> , Universitas Trisakti, Jakarta, 2012. Nuryanto A. Daim, <i>Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara</i> , Surabaya, Laksbang, 2014.	5%
---	--	---	--	--	--	----

10	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara, macam-macam putusan	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara	Kriteria: BAIK, CUKUP, KURANG Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Praktik / Unjuk Kerja	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara 1 X 50	Materi: Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara Pustaka: <i>Hilaire Barnett, Constitutional and Administrative Law , Fourth Edition, London : Cavendish Publishing, 2002. HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara , Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006. Philipus M. Hadjon, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi , Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011.</i> <i>Hukum Administrasi dan Good Governance , Universitas Trisakti, Jakarta, 2012. Nuryanto A. Daim, Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Surabaya, Laksbang, 2014.</i>	5%
----	--	---	--	--	---	----

11	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara, Mahasiswa dapat melanjutkan proses berperkara di PTUN dengan tahapan upaya hukum lainnya	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara	Kriteria: BAIK, CUKUP, KURANG Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara 1 X 50	Materi: Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara Pustaka: <i>Hilaire Barnett, Constitutional and Administrative Law , Fourth Edition, London : Cavendish Publishing, 2002. HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara , Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006. Philipus M. Hadjon, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi , Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011.</i> <i>Hukum Administrasi dan Good Governance , Universitas Trisakti, Jakarta, 2012. Nuryanto A. Daim, Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Surabaya, Laksbang, 2014.</i>	5%
----	---	---	--	--	---	----

						Materi: Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara Pustaka: Hilaire Barnett, <i>Constitutional and Administrative Law</i>, Fourth Edition, London : Cavendish Publishing, 2002. HR, Ridwan, <i>Hukum Administrasi Negara</i>, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006. Philipus M. Hadjon, <i>Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi</i>, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011. <i>Hukum Administrasi dan Good Governance</i>, Universitas Trisakti, Jakarta, 2012. Nuryanto A. Daim, <i>Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara</i>, Surabaya, Laksbang, 2014.	
--	--	--	--	--	--	---	--

12	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara, Mahasiswa dapat menjelaskan tentang eksekusi, macam-macam eksekusi, jenis-jenis eksekusi di peradilan.	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara	Kriteria: BAIK, CUKUP, KURANG Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara 1 X 50		Materi: Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara Pustaka: <i>Hilaire Barnett, Constitutional and Administrative Law , Fourth Edition, London : Cavendish Publishing, 2002. HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara , Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006. Philipus M. Hadjon, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi , Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011.</i> <i>Hukum Administrasi dan Good Governance , Universitas Trisakti, Jakarta, 2012. Nuryanto A. Daim, Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Surabaya, Laksbang, 2014.</i>	5%
13	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang pembuktian, macam-macam alat bukti, saksi	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara	Kriteria: BAIK, CUKUP, KURANG Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara 1 X 50		Materi: Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara Pustaka: <i>Hilaire Barnett, Constitutional and Administrative Law , Fourth Edition, London : Cavendish Publishing, 2002. HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara , Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006. Philipus M. Hadjon, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi , Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011.</i> <i>Hukum Administrasi dan Good Governance , Universitas Trisakti, Jakarta, 2012. Nuryanto A. Daim, Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Surabaya, Laksbang, 2014.</i>	5%

14	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara, mengevaluasi dan menyelesaikan laporan akhir (dokumen persidangan)	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara	Kriteria: BAIK, CUKUP, KURANG Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara 1 X 50	Materi: Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara Pustaka: Hilaire Barnett, <i>Constitutional and Administrative Law</i> , Fourth Edition, London : Cavendish Publishing, 2002. HR, Ridwan, <i>Hukum Administrasi Negara</i> , Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006. Philipus M. Hadjon, <i>Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi</i> , Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011. _____, <i>Hukum Administrasi dan Good Governance</i> , Universitas Trisakti, Jakarta, 2012. Nuryanto A. Daim, <i>Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara</i> , Surabaya, Laksbang, 2014.	5%
----	---	---	--	--	--	----

15	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara, kemahiran mahasiswa dalam menampilkan simulasi sidang	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara	Kriteria: baik, cukup, kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara 1 X 50	Materi: Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara Pustaka: <i>Hilaire Barnett, Constitutional and Administrative Law , Fourth Edition, London : Cavendish Publishing, 2002. HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara , Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006. Philipus M. Hadjon, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi , Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011.</i> <i>Hukum Administrasi dan Good Governance , Universitas Trisakti, Jakarta, 2012. Nuryanto A. Daim, Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Surabaya, Laksbang, 2014.</i>	5%
----	--	---	--	--	---	----

16	US	US	Kriteria: baik apabila benar semua, cukup apabila benar 50%, kurang apabila benar kurang dari 50% Bentuk Penilaian : Praktik / Unjuk Kerja, Tes	US 1 X 50		Materi: Menyusun beracara Peradilan Tata Usaha Negara Pustaka:	15%
----	----	----	--	--------------	--	---	-----

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	65%
2.	Praktik / Unjuk Kerja	27.5%
3.	Tes	7.5%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 15 November 2024

Koordinator Program Studi S1
Ilmu Hukum



VITA MAHARDHIKA
NIDN 0009028308

UPM Program Studi S1 Ilmu
Hukum



NIDN 0017098801

File PDF ini digenerate pada tanggal 8 Desember 2025 Jam 16:26 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

